

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Pamekasan

Kepolisian Resort Pamekasan dari aspek geografisnya adalah bagian dari kepolisian daerah Jawa Timur, merupakan satuan kerja kewilayahan yang terletak di Jalan Stadion No. 81 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang dipimpin oleh seorang Kapolres bernama AKBP Nowo Hadi Nugroho, S.H., S.I.K. Luas wilayah hukum sekitar 792.30 km². Satuan kerja wilayah Polres Pamekasan dibantu dengan adanya polsek sebanyak 12 polsek yang tersebar diseluruh Kabupaten Pamekasan. Adapun batas-batas wilayah kerja Polres Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa
2. Sebelah selatan berbatasan dengan selat Madura
3. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah kabupaten Sumenep
4. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah kabupaten Sampang

Struktur Organisasi Polres Pamekasan dipimpin oleh seorang Kapolres berpangkat AKBP dan dibantu seorang Wakapolres berpangkat Kompol, keduanya merupakan unsur pimpinan. Untuk melaksanakan tugas pimpinan dan pengelolaan organisasi unsur pimpinan dibantu unsur pembantu staf pimpinan yaitu Sikeu (seksi keuangan) dan Sinum (seksi umum). Kemudian adanya unsur pembantu staf pelaksanaan yaitu pembinaan bagsunda (bagian

sumber daya), perencanaan Bagren (bagian perencanaan) dan operasional yaitu Sat Binmas, serta dibantu pelaksanaan operasional Polsek dan Polair.⁴⁴

Tugas Kapolres dibantu unsur pelaksana tugas pokok dalam pelayanan yaitu SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu). Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UU No.2 tahun 2002 implementasinya dilakukan oleh satuan operasional yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Samapta, Sat Lantas, Sat Narkoba dan Sat Binmas, serta untuk mendekatkan pelayanan dalam membantu tugas pokok tersebut dibantu sub satuan Kerja yaitu Polsek dan Polair. Tugas Operasional kepolisian yang diemban Polri dilakukan dengan pola tugas yang pertama preemtip (meniadakan sumber timbulnya gangguan Kamtibmas) dilakukan oleh fungsi teknis satuan Samapta dan satuan lalu lintas, serta yang ketiga represif (penindakan atau penegakan terhadap gangguan nyata kamtibmas) yang dilakukan oleh fungsi teknis satuan Reskrim dan Reskoba.

Struktur organisasi satuan reserse kriminal Polres Pamekasan dipimpin oleh seorang kepala satuan/kasat yaitu AKP Bambang Hermanto SH, dan dibantu oleh pembantu pelaksana tugas Kasat yaitu KBO (Kaur Bin Opsnal) yakni IPTU.H. Setiono SH. Setiap Satuan Reserse dipimpin oleh Kanit serse yang bertanggung jawab secara langsung atas kinerja tugas anggotanya dibawah kepemimpinan Kasat Serse, sedangkan Kasat Serse bertanggung jawab kepada Kapolres. Adapun Bagian Unit Satuan Reskrim Polres Pamekasan Sebagai Berikut:

⁴⁴ Polres Pamekasan, *Profil Polres Pamekasan*. diakses di <https://reskrimpolrespmk.wordpress.com/profil-kapolres/> pada tanggal 7 juli 2017.

1. Unit Reskrim I Tipidum (Tindak Pidana Umum) Bertugas Khusus menangani kejahatan konvensional seperti Penipuan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, Unit Reskrim I Tipidum ini dipimpin oleh IPTU Iriyantono.
2. Unit Reskrim II Tipiring (Tindak Pidana Ringan) Bertugas Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya, Melaksanakan tindakan Refresif Tahap Awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, Melakukan tindakan refresif terbatas (Tipiring dan pengakan Perda). Fungsi Samapta merupakan sebagian Fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan Fungsi Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan

usaha jasa pengamanan (BUJP), SAR terbatas, TPTKP, TIPIRING dan PENEGAK PERDA, pengendalian massa (dalmas), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital / obyek vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. pertolongan dan penertiban masyarakat yang dipimpin oleh : AKP H.Agus Sutrisno

3. Unit Reskrim III Tipidek (Tindak Pidana Ekonomi) Bertugas Khusus Menangani kejahatan seperti yang berkaitan dengan ekonomi Negara, galian pertambangan, bahan bakar minyak, (BBM), *Illegal Logging*, Unit Reskrim II ini dipimpin oleh IPDA Agus Sugianto SH.
4. Unit Reskrim IV Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) Bertugas khusus menangani Kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), lingkungan hidup. Selain mengani pidana tertentu unit III ditugaskan untuk membantu unit I yang berkaitan dengan tindak pidana umum, Unit Reskrim III ini dipimpin oleh IPDA.Barid Fauzan SH.
5. Unit Reskrim V Unit Pidsus (Tindak Pidana Khusus) Bertugas menangani kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana Korupsi. Unit Reskrim II ini dipimpin oleh IPDA Anwar Subagyo SH.

6. Unit Reskrim PPA Unit PPA (Perlindungan perempuan dan anak)

Bertugas memiliki wewenang khusus untuk menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak, Seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang korbannya terjadi pada anak dan perempuan..⁴⁵

❖ **VISI DAN MISI**

- **Visi POLRI**

Terciptanya keamanan dalam negeri dari segala bentuk ancaman dan gangguan berupa kejahatan guna terlaksananya Pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya masyarakat yang damai dan sejahtera. Polri memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

- **Misi POLRI**

Misi Polri adalah Tugas Pokok Polri sebagaimana tercantum dalam undang-undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat.

⁴⁵ *Ibid.*

Penjabaran tugas pokok (Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002): Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan ,dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

❖ **Visi dan Misi Reserse Kriminal**

- **Visi** Reskrim Polri Terwujudnya Penyidik yang profesional dan profosional dan dipercaya masyarakat. Misi Reskrim Polri Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri, maka perlu dijabarkan ke dalam misi.
- **Misi** Merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menjelaskan mengapa Reskrim Polri ada, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukan⁴⁶
-

⁴⁶ *Ibid.*

B. Gambaran Umum Tentang Terjadinya Kekerasan Hewan Terhadap Kegiatan Kerapan Sapi.

a. Pengertian Kerapan Sapi

Kerapan Sapi adalah sepasang atau beberapa pasang sapi yang diperuntukkan dalam perlombaan Kerapan Sapi untuk diadu cepat, bergerak cepat dan dinamis, sedangkan Sapi karap adalah Sapi yang digunakan untuk berkarap baik satu maupun lebih setiap perlombaan kegiatan Kerapan Sapi. Setiap Tahunnya ada 24 Sapi siap untuk diperlombakan. Sapi yang dikarap terdapat beberapa macam Kerapan Sapi antara lain: '*Kerap keni*' (karapan kecil), karapan jenis ini diadakan pada tingkat kecamatan atau kewadenan. Para peserta adalah yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Sapi karap dari luar tidak diperbolehkan turut serta. Jarak tempuh hanya 100 meter. Dalam kategori ini yang diutamakan adalah kecepatan dan lurusness. "*Kerap keni*" ini biasanya diikuti oleh Sapi-sapi kecil dan baru belajar. Pemenangnya merupakan peserta untuk mengikuti "*Kerap rajheh*". "*Kerap jher ajheren*" (karap latihan), karapan latihan tidak tertentu harinya, bisa diadakan setiap hari sesuai dengan keinginan pemilik atau pelatih sapi karap tersebut, pesertanya adalah sapi lokal. "*Kerap onjhengan*" (karap undangan) adalah pacuan khusus yang diikuti oleh peserta yang diundang baik dari dalam kabupaten maupun luar kabupaten. Karapan ini diadakan menurut waktu keperluan atau dalam acara peringatan hari-hari tertentu. "*Karap rajah*" (karap besar), karapan besar ini disebut juga karap negara, umumnya diadakan di ibukota

keberhasilan panen jagung maupun tembakau. Seiring berjalannya waktu Kerapan Sapi menjadi permainan lomba atau pertandingan yang menjadi kegemaran masyarakat Madura.

Disebutkan bahwa Kerapan Sapi sudah ada sejak abad 14. Istilah-istilah dalam kerapan menunjuk pada ajaran-ajaran Islam yang dibawa Kiai Pratanu pada tahun 1531. Sekitar abad ke 14 Sapudi diperintah oleh Panembahan Wlingi ia menanamkan cara beternak Sapi yang kemudian dilanjutkan oleh puteranya yang bernama Adi Poday.

c. Bentuk penggunaan alat “*Rekeng*” dalam Kegiatan Kerapan Sapi.

Kekerasan dalam Kerapan Sapi bisa dilihat dari adanya penggunaan “*Rekeng*” oleh joki sapi. “*Rekeng*” merupakan sejenis tongkat dengan paku-paku tajam di ujungnya. Dipukulkan ke arah pantat sapi berkali-kali dari garis *start* hingga garis *finish*. Pukulan yang diarahkan ke pantat sapi menimbulkan luka pada sapi hingga mem-butuhkan waktu beberapa hari agar sapi kembali pulih dan juga dengan akibat menggunakan alat “*Rekeng*” dalam kegiatan Kerapan Sapi setiap tahun perlombaan mengalami Kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan pada saat Kejuaraan Tingkat Kabupaten sehingga sapi mengakibatkan tidak produktif untuk di perlombakan kembali dalam artian mengalami kecacatan dan kecacatan dialami sebab yang diperlakukan oleh joki ialah perbuatan yang berlebihan sehingga lari sapi tidak beraturan dan menabrak batasan yang telah disediakan sehingga mengakibatkan kecacatan pada sapi, hal tersebut adalah merupakan dari bagian perubahan dalam Kegiatan

Kerapan Sapi yang bergeser kepada tindakan kekerasan, adapun sarana tidak hanya “*Rekeng*” yang merupakan sebagai alat kekerasan dalam kegiatan Kerapan Sapi adapun macam-macam alat kekerasan dalam kegiatan Kerapan Sapi ialah:

Gambar : 2



Sumber dokumentasi : Pada saat perlombaan Kerapan Sapi tingkat Kabupaten Pamekasan tanggal 27 Agustus 2017.

Tabel 1: bentuk alat kekerasan di ringkas dalam bentuk Tabel

Alat	Cara melakukannya	Akibat	Pelaku
<i>Rekeng</i>	Di pukul bagian Pantat Sapi	Luka	Joki
<i>Co-raccoh</i>	Di tusuk dengan kayu yang berisi paku pada Pantat Sapi	Luka	Pendamping
<i>Selop</i>	Pangkal ekor dan di masukin bagian lubang pantat sapi yang berisi paku	Luka	Pendamping
Balsam	Mata yang deoleskan secara berlebihan	Perih	Pendamping

maupun mancanegara terhadap perlakuan pada sapi yang kerap yang diwarnai unsur kekerasan.

Tahun 2008 melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang adanya penyiksaan terhadap hewan dengan esensi isnya bahwa kerap sapi dengan menggunakan “*Rekeng*”, melanggar tatanan agama dan undang-undang tentang HAM kehewan. Tahun 2012,seruan dan penegasan dari berbagai lembaga agar rules of the game (aturan main) kerap sapi dikembalikan seperti pada masa lalu semakin menghangat.mereka mengharapkan festival kerap sapi tidak perlu ada perlakuan kekerasan terhadapnya.

Para ulama dari berbagai ormas islam di Madura menolak praktek kekerasan dalam pelaksanaan Kerapan Sapi. Mereka menegaskan bahwa praktek dalam pelaksanaan pertandingan itu tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kalangan profesi advokat pun bersuara lantang mengungkapkan fakta adanya praktik penyiksaan hewan tidak hanya melanggar etika moral tetapi juga melanggar hukum positif,diantaranya: pasal 302 kitab undang-undang hukum pidana(KUHP), pasal 66 UU18/2009.⁴⁹

Tahun 2012 pertandingan piala presiden mengalami perubahan. Ada dua model aturan main yang berkembang, Kerapan Sapi dengan kekerasan atau menggunakan “*Rekeng*”,dan Kerapan Sapi tanpa kekerasan , dikenal dengan sebutan pakopak . model ini menggunakan sebilah bambu

⁴⁹ *Ibid* ,hal 114

C. Kegiatan Kerapan Sapi yang menggunakan “*Rekeng*” Apakah merupakan Tindak Pidana di tinjau dari pasal 302 ayat 1 KUHP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai analisa yuridis sosiologis dalam Implementasi pasal 302 ayat 1 KUHP tentang Kekerasan hewan dalam pelaksanaan Kerapan Sapi bahwa dalam ranah perakteknya pasal 302 ayat 1 tersebut sampai saat ini belum pernah yang kemudian di tegakkan atau diterapkan di lapangan oleh aparat kepolisian.

Hal ini yang kemudian penulis tertarik dalam mengangkat judul tentang kekerasan terhadap hewan dalam kegiatan Kerapan Sapi Madura di Kabupaten Pamekasan dan sampai sejauhmana kekuatan normatif di tengah –tengah masyarakat Pamekasan tersebut apakah pasal 302 ayat 1 termasuk sebagai dasar hukum dalam kekerasan kegiatan Kerapan Sapi.

Berdasarkan hasil dari wawancara untuk mengetahui Apakah dalam kegiatan Kerapan Sapi yang menggunakan “*Rekeng*” merupakan Tindak Pidana di tinjau dari pasal 302 ayat 1 KUHP ,menurut Fadilatur Rohmah selaku Kaurmintu Sat Reskrim mengatakan :

Masalah Tindak Pidana penganiayaan hewan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 302 ayat 1 KUHP merupakan kasus kategori tindak pidana konvensional yang menangani adalah unt idik 2/Tipiring di Satreskrim Polres Pamekasan, perlu di ketahui bahwa sampai saat ini belum ada Tindak Pidana tentang Penganiayaan hewan sedangkan dalam pembahasan ini penganiayaan hewan pada budaya Kerapan Sapi, Kerapan Sapi itu memang suatu cara untuk di perlombakan Sapi supaya Sapi lari lebih kencang, dan tidak termasuk dalam pasal 302 ayat 1 KUHP. Kekerasan dalam hewan tersebut diatur dalam Undang-undang yang berkaitan dengan hewan secara yuridis yang digunakan sebagai dasar untuk menanggulangi kekerasan hewan dalam Kegiatan Kerapan Sapi yang sebagaimana merupakan kekerasan hewan dalam Kerapan Sapi yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.⁵¹

Analisa yuridis pasal 302 ayat 1 Merupakan Tindak Pidana Hewan namun tersebut yang tidak merupakan sebagai dasar hukum menurut aparat kepolisian yang berkaitan dengan Kerapan Sapi adapun unsur - unsur tersebut dalam bentuk Tabel ialah :

Tabel 2. Kegiatan Kerapan Sapi di Tinjau Pasal 302 ayat 1 KUHP

No.	Pasal	Kerapan sapi
1.	Pasal 302 Ayat (1)	
Unsur Subjektif		
	- Barang siapa	Joki Kerapan Sapi
	- Tanpa tujuan yang patut	Kerapan sapi memiliki tujuan untuk diperlombakan .
	- Melampaui batas	Penganiayaan hewan dalam Kegiatan Kerapan Sapi merupakan perbuatan yang berlebihan yang dilakukan para Joki.
Unsur Objektif		
	- Dengan sengaja	Para Joki dengan sengaja menganiayaan hewan dalam Kegiatan Kerapan Sapi dengan menggunakan “ <i>Rekeng</i> ” untuk Sapi berlari dengan Kencang

⁵¹ Wawancara dengan Fadilatur Rohmah , Kaurmintu Sat Reskrim, tanggal 07 Juli 2017

Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yakni Pasal 66A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan / atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Mengenai Sanksi Pidananya Dalam Pasal Tersebut Diatur Dalam Pasal 91 B Sebagai Berikut :

- (1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

D. Upaya yang dilakukan Polres Pamekasan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pasal 302 ayat 1 KUHP dalam Kerapan Sapi

Berdasarkan hasil penelitian penulis ingin mengetahui solusi Untuk mengatasi permasalahan Tindak Pidana kekerasan hewan Terhadap Kegiatan Kerapan Sapi di Polres Pamekasan ,

Berdasarkan hasil wawancara untuk mengetahui solusi dalam mengatasi permasalahan kekerasan hewan dalam Kegiatan Kerapan Sapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Hermanto selaku Kasat Reskrim Ada

beberapa Point Upaya Polres Pamekasan untuk bertindak dalam mengatasi atau menanggulangi permasalahan tersebut menurut Bambang Hermanto selaku Kasat Reskrim yaitu :

- a. Melakukan himbauan tentang dampak dan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan hewan melalui satbinmas Polres Pamekasan yang bertugas untuk melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah /lembaga/ organisasi masyarakat serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memperdayakan upaya pencegahan penganiyaan hewan dalam Kerapan Sapi
- b. Melakukan penggalangan agar tidak melakukan penganiyaan hewan, yang dimaksud tersebut untuk menyadari masyarakat terutama Pemilik Sapi Kerapan dalam bertujuan mensosialisasi secara yuridis bahwa tindakan joki yang menggunakan “*Rekeng*” tersebut merupakan melanggar hukum yang berlaku.
- c. Melakukan patroli dialogis dengan pemilik hewan agar tidak melakukan penganiyaan yang dilaksanakan oleh Sat Samapta Polres Pamekasan, dalam artian melaksanakan Tugas Fungsi aparat kepolisian dalam hal melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat upaya adanya kedekatan emosional antara pemilik Sapi Kerapan, dan mengupayakan tindakan preventif terhadap Pemillik Sapi atau yang disebut pencegahan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Kerapan Sapi dan berupaya untuk menyadarkan kepada pemilik Sapi perbuatan atau tindakan tersebut melanggar Hukum yang berlaku

- d. Melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya penganiayaan hewan dan apabila terjadi penganiayaan hewan maka dilakukan upaya paksa (penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti) yang di lakukan oleh Satreskrim Polres Pamekasan.
- e. Razia atau penindakan dilakukan pada saat adanya kerapian sapi baik tingkat kecamatan ,tingkat kabupaten maupun piala presiden .

Perlawanan terhadap adanya penindakan saat dilakukan razia seringkali terjadi pada pemilik Sapi namun penindakan yang dilakukan bukan terhadap penganiayaan Sapinya melainkan perlombaan nya seperti Sapi diberangkatkan terlebih dahulusebelum lawannya sehingga mendahului sampai finish. Terhadap hal itu pihak kepolisian sebagai unsur pengamanan melakukan upaya pendekatan Internal- Eksternal penyelidikan dan jika ada indikasi terjadi konflik maka kita antisipasi misalnya menghentikan Kerapian Sapi untuk sementara dan lanjutkan setelah kembali kondusif.⁵²

E. Kendala apa yang dihadapi Polres Pamekasan dalam Menanggulangi Tindak Pidana pasal 302 ayat 1 KUHP dalam Kerapian Sapi ?

Berdasarkan hasil penelitian penulis ingin mengetahui Kendala – Kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan Tindak Pidana kekerasan hewan Terhadap Kegiatan Kerapian Sapi di Polres Pamekasan ,

⁵² Wawancara dengan Bambang heranto, Kasat Reskrim Ajun komisaris Polisi, tanggal 07 Juli 2017.

Adapun hasil wawancara untuk mengetahui Kendala – Kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan kekerasan hewan dalam Kegiatan Kerapan Sapi seperti yang disampaikan oleh AKP.H Sutrisno selaku Sat Samapta Ada beberapa Point kendala – kendala yang dihadapi AKP.H selaku Sat Samapta untuk bertindak dalam menanggulangi permasalahan tersebut menurut Responden AKP.H Sutrisno selaku Sat Samapta yaitu :

- a. *“Warga paneka ben peserta kerrap gitak taoh ben tak menyadari mon kelakoan pangerap seng angguay “rekeng” jreah kelakoan seng bentoran bik hukum se taoh para pengerap jreah gun gebey eadduh sapeh jreah”*

Artinya :

Warga atau peserta Kerapan Sapi tidak pernah tahu dan tidak menyadari bahwa tindakannya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mereka tahu bahwa Kerapan Sapi itu adalah sapi hewan peliharaan yang menang untuk diadu.

- b. *“Kerappen Sapeh nekah tak bisah peambhu ben e petadhek polana Kerapen Sapeh jreah la deddhih tradisinnah reng madureh*

Artinya :

Kerapan Sapi tidak bisa dihentikan dan di tiadakan karena Kerapan Sapi memang sudah menjadi budaya di Madura.

Cara menanggulangi kendala tersebut Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan berupa Intruksi Gubernur yaitu tentang Kerapan Sapi tanpa kekerasan namun tidak terealisasi karena memang Sapi yang di perlombakan harus di

perlakukan seperti itu. Melakukan pendekatan kepada para pemilik Sapi agar dalam lomba itu tidak ada kekerasan .

Kerjasama Polres Pamekasan sudah dilakukan dengan instansi lain seperti bakoowil selaku ketua pelaksana kerapen sapi namun kerjasama yang dilakukan dalam rangka pengamanan Kerapan Sapi, agar dalam pelaksanaannya tertib lancar dan kondusif serta mengantisipasi jika terjadi kejahatan saat pelaksanaan Kerapan Sapi dimaksud.

Selain KUHP Terdapat UU lain yang mengatur tentang larangan terhadap penganiyaan hewan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan instruksi gubenur.

Dalam pasal 302 ayat 1 KUHP belum efektif untuk dijadikan sebagai dasar dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 ayat 1 KUHP dan sampai dengan saat ini eksistensi pasal 302 ayat 1 KUHP akan diupayakan untuk diterapkan jika terdapat tindak pidana sebagai tersebut.⁵³

⁵³ Wawancara dengan AKP H Sutrisno , selaku bertugas Sat Samapta, tanggal 07 Juli 2017.